



DAMPAK KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN DI BAPPEDA PROVINSI NTB: IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

IMPACT BUDGET EFFICIENCY POLICY IN BAPPEDA NTB PROVINCE: IMPLICATIONS FOR PUBLIC SERVICE

Dewi Yuliati

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Email: dewiyuliati87bima@gmail.com

Abstrak

Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan pada Tahun 2025 sebagai payung hukum dalam penerapan kebijakan efisiensi anggaran diseluruh sektor pemerintahan termasuk di BAPPEDA Provinsi NTB. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran dan strategi yang digunakan untuk meminimalisir dampak efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik di BAPPEDA Provinsi NTB. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan efisiensi anggaran di BAPPEDA Provinsi NTB terhadap pelayanan publik berupa terbatasnya anggaran operasional yang berdampak pada kinerja SDM, efektifitas koordinasi yang menurun, program pembangunan daerah yang terbatas, pengembangan sistem informasi terhambat, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menurun. Sedangkan strategi yang diterapkan oleh BAPPEDA NTB untuk meminimalisir dampak efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik berupa penguatan digitalisasi dan kerjasama dengan sektor swasta, program prioritas pembangunan diutamakan, menerapkan work flexibility, evaluasi secara berkala efktivitas program, koordinasi pemerintah pusat dan daerah ditingkatkan, dan melibatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah supaya pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat Provinsi NTB. Adapun rekomendasi dari penelitian ini, diharapkan BAPPEDA PROVINSI NTB dapat mengoptimalkan anggaran berbasis kinerja, digitalisasi pelayanan perencanaan dan pengawasan, kolaborasi dengan pihak eksternal, dan melakukan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan.

Kata Kunci: *BAPPEDA Provinsi NTB, Efisiensi Anggaran, Pelayanan Publik.*

Abstract

Budget efficiency policies such as the Presidential Instruction and the Minister of Finance Letter in 2025 as a legal umbrella in the implementation of budget efficiency policies throughout the government sector including in the NTB Province BAPPEDA. Therefore, this study aims to analyze the impact of budget efficiency policies and strategies used to minimize the impact of budget efficiency on public services in BAPPEDA of NTB Province. This research is normative research and uses statutory and conceptual approaches. The results showed that the impact of budget efficiency policies in BAPPEDA NTB Province on public services in the form of limited operational budgets that have an impact on staff performance, decreased coordination effectiveness, limited regional development programs, hampered information system development, decreased public satisfaction

with public services. While the strategies implemented by BAPPEDA NTB to minimize the impact of budget efficiency on public services in the form of strengthening digitalization and cooperation with the private sector, prioritizing development priority programs, implementing work flexibility, periodically evaluating program effectiveness, improving coordination between central and local governments, and involving public participation in regional development so that public services can be carried out optimally according to the needs of the people of NTB Province.

Keywords: *BAPPEDA of NTB Province, Budget Efficiency, Public Services.*

PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.¹ BAPPEDA memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, dalam perumus kebijakan pembangunan dan penilaian atas pelaksanaannya.² Dengan kata lain, BAPPEDA bertanggung jawab dalam memastikan bahwa program-program pembangunan yang dijalankan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat daerah.

BAPPEDA merupakan unsur pendukung pemerintah khususnya BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dalam hal ini sebagai unsur pendukung/pembantu Gubernur Provinsi NTB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi NTB bahwa BAPPEDA Provinsi NTB bertugas dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koordinasi perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Jangka Panjang (RKPJP), Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).³ Dari beberapa tugas BAPPEDA tersebut menggambarkan bahwa BAPPEDA Provinsi NTB memiliki tugas yang kompleks sehingga membutuhkan anggaran yang memadai supaya dapat memberikan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di NTB. Akan tetapi, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah akan membawa tantangan bagi Pemerintah Provinsi NTB khususnya BAPPEDA Provinsi NTB.

Pemerintah Provinsi NTB memiliki alokasi anggaran pada tahun 2025 mencapai Rp 27,07 Triliun yang terdiri dari Rp 7,13 Triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Rp 20,07 Triliun untuk Transfer Ke Daerah (TKD).⁴ Namun, dari jumlah alokasi anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berpotensi melakukan efisiensi anggaran sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Nashib Ikrom yang merupakan anggota Komisi III DPRD NTB bahwa estimasi efisiensi anggaran sejumlah Rp 400 Miliar.⁵ Efisiensi anggaran tersebut dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor

1 Muhammad Nasir. (2023). "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023". *Journal of Geopolitics and Public Policy*, Volume 1, Issue 2, hlm. 23.

2 Siti Nur Ajizah, Endra Wijaya, dan Febri Meutia. (2021). "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah". *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4, No. 1, hlm 44.

3 TUPOKSI Bappeda, <https://bappeda.ntbprov.go.id/tupoksi-bappeda/>, diakses 3 Februari 2025.

4 Nathea Citra, *NTB Terima Alokasi Anggaran Rp 27,07 Triliun di 2025, Fokus pada Sektor ini*, <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/bali/nusra/d-7688727/ntb-terima-alokasi-anggaran-rp-27-07-triliun-di-2025-fokus-pada-sektor-ini/amp>, diakses 4 Maret 2025.

5 Suara NTB.com, *DPRD NTB Sebut Potensi Efisiensi Anggaran di APBD 2025 Capai Rp400 Miliar*, <https://suarantb.com/2025/02/12/dprd-ntb-sebut-potensi-efisiensi-anggaran-di-apbd-2025-capai-rp400-miliar/>, diakses 4 Maret 2025.

S-37/MK.02/2025 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.⁶ Kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan dengan tujuan pengurangan pemborosan, penganggaran berbasis kinerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan teknologi, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mendukung program Bergizi Gratis yakni makan Bergizi Gratis (MBG).⁷ Namun, kebijakan efisiensi anggaran memiliki dampak terhadap pelaksanaan program-program prioritas yang telah disusun dan direncanakan oleh BAPPEDA Provinsi NTB terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.⁸ Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁹ Dari definisi pelayanan publik tersebut mencakup segala aspek kehidupan masyarakat sehingga dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran akan menyebabkan beberapa program harus dikaji ulang, ditunda, atau bahkan dihentikan dan hal ini akan berimplikasi langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

Kualitas dari pelayanan publik merupakan salah satu bentuk terciptanya hubungan harmonis dan dinamis antara masyarakat sebagai pengguna layanan seperti jasa dan pemerintah sebagai penyelenggara layanan.¹⁰ Kualitas baik buruknya dari suatu pelayanan berdasarkan prespektif penerima atau pengguna layanan bukan dari prespektif penyelenggara.¹¹ Akan tetapi, dengan adanya efisiensi anggaran akan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh BAPPEDA Provinsi NTB seperti layanan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah mengalami penyesuaian akibat keterbatasan anggaran. Selain itu, keterbatasan ini juga berdampak pada kinerja pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi NTB, dimana keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan SDM dapat menghambat peningkatan kapasitas pegawai dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang efektif.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kebijakan efisiensi anggaran juga membuka peluang bagi Bappeda NTB untuk melakukan reformasi dalam tata kelola anggaran pemerintahan daerah dan hal ini sejalan dengan pandangan H. Iswandi Kepala BAPPEDA NTB yang menyatakan bahwa pos-pos anggaran dalam APBD Provinsi NTB

6 Ismail Azwardi. (2025). "Efisiensi Anggaran 2025 dan Ancaman terhadap Akses Keadilan bagi Masyarakat Tidak Mampu: Analisis terhadap Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015, <https://www.pa-sanggau.go.id>, diakses 4 Maret 2025.

7 ABD.Choliq, *Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau*, <https://www.djkn.ke-menkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/17532/Dukungan-ASN-Terhadap-Efisiensi-Anggaran-Menjadi-Kunci-Utama-Keberhasilan.html#:~:text=Tujuan%20dari%20diberlakukan%20efisiensi%20anggaran,hal%20Dhal%20yang%20kurang%20bermanfaat.>, diakses 4 Maret 2025.

8 Dahyar Daraba, Rudi Salam, Indra Dharma Wijaya, Aris Baharuddin, Denok Sunarsi, Bustamin. (2023). "Membangun Pelayanan Publik Yang Inofatif dan Efisien di Era Digital di Indonesia, Pallangga Praja, Volume 5, Nomor 1, hlm. 32.

9 Novida Herlia Nita. (2023). "Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun Anggaran 2019 Sampai Dengan 2021 di Panti Sosial Bina Wanita Melati Provinsi Kalimantan Selatan". *Kindai*, Volume 19 Nomor, 3, hlm.267-279.

10 Gali Artha Cendana dan Trena Aktiva Oktariyanda. (2022). "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa Jmbok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang". *Publika*, Volume 10, nomor 4, hlm. 1089-1100.

11 *Ibid.*

sedang disesuaikan dan memformulasikan kembali prioritas yang lebih tajam, fokus pada pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan.¹² Artinya, dengan adanya efisiensi anggaran, BAPPEDA NTB dituntut untuk lebih memilih dalam menentukan prioritas pembangunan dan ekonomi. Selain itu, efisiensi anggaran sebagai langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah guna memastikan setiap pengeluaran memiliki nilai manfaat yang optimal¹³ dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat serta BAPPEDA NTB dituntut untuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam bagaimana dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh BAPPEDA Provinsi NTB dan bagaimana strategi yang diterapkan BAPPEDA Provinsi NTB untuk meminimalkan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kualitas pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas pelayanan publik dan strategi yang digunakan supaya pembangunan daerah berjalan secara optimal berdasarkan kondisi efisiensi atau pembatasan anggaran di BAPPEDA Provinsi NTB dengan menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan memahami dampak kebijakan efisiensi anggaran secara komprehensif, BAPPEDA Provinsi NTB berharap akan dapat menyusun strategi prioritas yang lebih adaptif dan inovatif untuk mengelola anggaran yang terbatas untuk pembangunan secara berkelanjutan di Provinsi NTB.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Yang Diberikan Oleh Bappeda Provinsi NTB

Pelayanan publik di Indonesia selalu berkaitan dengan tata kelola instansi pemerintah, baik itu pusat dan daerah serta badan usaha negara, yang ditujukan untuk memudahkan pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara.¹⁴ Masyarakat sebagai pengguna layanan publik tentunya mengharapkan untuk madapatkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan bebas dari korupsi, kolusi, daan nepotisme.¹⁵ Dari harapan masyarakat tersebut, maka masyarakat mengharapkan dapat memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya dan yang dapat memberikan pelayanan publik adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang mempunyai kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya ASN di BAPPEDA Provinsi NTB.

BAPPEDA Provinsi NTB adalah sebagai salah satu pelaksana pelayanan publik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (5) UU Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Namun, dalam

¹² Nur Cahaya, 2025, *Pemprov NTB Berpotensi Efisiensi Anggaran Rp 168,17 Miliar*, <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1505746504/pemprov-ntb-berpotensi-efisiensi-anggaran-rp-16817-miliar>, diakses 12 Maret 2025.

¹³ ABD. Choliq, 2025. *Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/17532/Dukungan-ASN-Terhadap-Efisiensi-Anggaran-Menjadi-Kunci-Utama-Keberhasilan.html#:~:text=Dampak%20Positif%20dari%20Efisiensi%20Anggaran&text=Merupakan%20langkah%20strategis%20dalam%20pengelolaan,memiliki%20nilai%20manfaat%20yang%20optimal>, diakses 12 Maret 2025.

¹⁴ Andi Setyo Pembudi. (2023). *“Permasalahan Pelayanan Publik dan Peran Ombudsman Perwakilan Dalam Pendampingan Aparatur sipil Negara”*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Volume 13, Nomor 2, hlm. 129.

¹⁵ Ibid.

serangkaian tindakan pelayan publik yang akan diberikan pada masyarakat di Provinsi NTB pada tahun 2025 akan mengalami perubahan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden dan Surat Kementerian Keuangan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di BAPPDA Provinsi NTB memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Adapun dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh BAPPEDA Provinsi NTB, sebagai berikut:

- a. Efisiensi anggaran operasional menyebabkan terbatasnya SDM dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Berbagai program dan kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik jika SDM tidak memadai karena SDM yang efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan upaya peningkatan kinerja pegawai, baik tingkat individual maupun kelompok dan organisasi/istitutusnya.¹⁶ Adapun salah satu kegiatan peningkatan kinerja pegawai dapat dilakukan melalui perjalanan dinas. Ketentuan tentang perjalanan dinas telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Perjalanan dinas merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara baik pusat maupun daerah dengan sumber dana dari APBN/APBD untuk melakukan berbagai kepentingan antara lain; studi komparasi, rapat, seminar, diklat, dan berbagai kegiatan lainnya.¹⁷ Dari berbagai komponen terkait perjalanan dinas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perjalanan dinas memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan daerah. Oleh karena itu, adanya efisiensi anggaran berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan suatu daerah.
- b. Menurunnya efektivitas koordinasi dan perencanaan pembangunan daerah. Efektivitas sebagaimana dikemukakan Mardiasmo sebaaiman dikutip oleh Nadia Resti Oktaviani dan Vina Citra Mulyandani bahwa kegiatan dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).¹⁸ Artinya, dengan adanya efisiensi anggaran, dapat menurunkan efektivitas beberapa kegiatan koordinasi, seperti diskusi lintas sektor, pertemuan tatap muka, dan sosialisasi kebijakan menjadi terbatas. Dampak efisiensi dapat memengaruhi komunikasi antara BAPPEDA Provinsi NTB dengan instansi lain tidak maksimal, menghambat pelaksanaan proses perencanaan dan pembangunan NTB dan kurang maksimalnya pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan sehingga BAPPEDA Provinsi NTB tidak bisa mencapai tujuan akhir dari kebijakannya.
- c. Terbatasnya pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Masyarakat merupakan individu yang akan mengalami langsung adanya efisiensi anggaran khususnya pada program pembangunan untuk masyarakat. Pembangunan suatu negara/daerah pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat sehingga pembangunan perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.¹⁹ Akan

16 Eryana, E. (2018). "Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa". IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Volume 7, Nomor 1, hlm. 89-95.

17 Sudarmono dan Ahmad Baihaki. "Peyeragaman Standar Tarif Perjalanan Dinas Antara APBN dengan APBD". <https://bengkulu.bpk.go.id>, diakses 4 Maret 2025.

18 Nadia Resti Oktaviani, Vina Citra Mulyandani. (2022). "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan Badan Kedudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020". Indonesian Accounting Literacy Journal, Volume 02, Nomor 02, hlm. 484-493.

19 Frans Goo. At. al, (2019). "Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Ciawi, <https://ojs.unida.ac.id>, hlm. 4.

tetapi, beberapa program yang membutuhkan anggaran yang besar akan terhambat karena dampak dari efisiensi anggaran seperti program pembangunan infrastruktur, penyusunan kebijakan strategi daerah, peningkatan kapasitas masyarakat yang harus mengalami penyesuaian, ditunda, bahkan dihentikan. Dari dampak tersebut, maka pembangunan di Provinsi NTB tidak proposional dan manfaat yang diperoleh masyarakat berkurang.

- d. Efisiensi anggaran berdampak pada terhambatnya pengembangan sistem teknologi informasi yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi birokrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada proses birokrasi kerja di pemerintahan dan layanan publik sudah menjadi kebutuhan yang penting dan sudah diberlakukan sejak dulu.²⁰ Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden tersebut ditujukan untuk tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan efektif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.²¹ Akan tetapi, jauh sebelum Peraturan Presiden tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan di Provinsi NTB sudah diterapkan sejak lama disetiap unit kerja pemerintahan khususnya di BAPPEDA Provinsi NTB telah mulai memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan mengadopsi sistem *e-planning* pada tahun 2016 dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.²² *E-planing* merupakan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terdapat proses Musyawarah Perencanaan Pembanguna (Musrenbang) di dalam prosesnya.²³ Selain itu, di dalam Musrenbang terdapat berbagai usulan seperti usulan bantuan keuangan, masa reses kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hibah, bantuan sosial, dan usulan kepada Gubernur.²⁴

Sistem *e-planning* adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disampaikan kepada masyarakat.²⁵ Selain *e-planning*, pemanfaatan teknologi lainnya yang telah digunakan adalah *e-budgeting*²⁶ untuk mempercepat dan mendukung proses penyusunan rencana program daerah dan transparansi anggaran. Namun, efisiensi anggaran dapat menghambat pengembangan lebih lanjut dari sistem *e-planning* dan *e-budgeting* tersebut sehingga efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak dapat terlaksana secara maksimal.

- e. Efisiensi anggaran berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik akan mengalami keterlambatan informasi, berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, dan keterbatasan akses terhadap layanan perencanaan pembangunan. Jika dampak tersebut tidak diatasi, maka akan dapat mempengaruhi tingkat kepuasan

20 Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Provinsi NTB. <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses 4 Maret 2025.

21 *Ibid*.

22 BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat, “Pengembangan *e-Planing* dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah”. <https://bappeda.ntbprov.go.id/pengembangan-e-planning-dalam-sistem-informasi-pembangunan-daerah/>, diakses 4 Maret 2024.

23 Allysa Sekar Apriliani, Novi Dirgantari, Eko Hariyanto, Hardiyanto Wibowo. (2023). “Pengaruh *E-Planing E-Budgeting*, dan *E-Procurement* Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”. Owner: Riset & Jurnal Akutansi, hlm. 256.

24 *Ibid*

25 BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat, “Pengembangan *e-Planing* dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah”. <https://bappeda.ntbprov.go.id/pengembangan-e-planning-dalam-sistem-informasi-pembangunan-daerah/>, diakses 4 Maret 2024.

26 PondRaw. “Banggar tegaskan Pookir DPRD untuk mewujudkan NTB Gemilang”, <https://dprd-ntb-prov.go.id/banggar-tegaskan-pookir-dprd-untuk-wujudkan-ntb-gemilang/>, diakses 4 maret 2025.

masyarakat karena masyarakat merupakan indikator utama untuk mengetahui baik buruknya pelayanan publik²⁷ khususnya pelayanan publik yang diberikan oleh BAPPEDA Provinsi NTB.

Berdasarkan dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di BAPPEDA Provinsi NTB dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran mempunyai dampak yang kompleks terhadap pelayanan publik, baik terbatasnya SDM dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, menurunnya efektivitas koordinasi dan perencanaan pembangunan daerah, terbatasnya pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, terhambatnya pengembangan sistem teknologi informasi yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, dan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di BAPPEDA Provinsi NTB. Oleh karena itu, dari berbagai dampak efisiensi anggaran tersebut perlu dilakukan upaya strategi untuk menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik yang baik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Strategi Yang Dapat Diterapkan Untuk Meminimalkan Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Pelayanan Publik Oleh Bappeda Provinsi NTB

BAPPEDA Provinsi NTB memiliki 2 (dua) isu strategis yang menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024-2026 yakni kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang belum efektif dan efisien.²⁸ Dari 2 isu tersebut, jika dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku sejak 2025, maka BAPPEDA Provinsi NTB memerlukan strategi yang komprehensif dan inovatif agar kualitas pelayanan publik tetap maksimal untuk merespon dampak yang ditimbulkan dari efisiensi anggaran. Adapun strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik oleh BAPPEDA Provinsi NTB, sebagai berikut:

- a. Pada era digital yang berkembang begitu pesat dan hampir semua aspek kehidupan menggunakan perangkat teknologi informasi²⁹, maka penguatan layanan digitalisasi perlu dilakukan guna meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi NTB dengan memperkuat sistem *e-planning* dan *e-budgeting* yang memungkinkan penyesuaian yang lebih efektif tanpa mengandalkan anggaran operasional yang besar. Artinya, dengan penguatan dan peningkatan digitalisasi memungkinkan BAPPEDA Provinsi NTB dapat mengurangi biaya administrasi, mempercepat pengolahan data, serta meningkatkan akses informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dengan melalui *e-planning* dan *e-budgeting* dengan syarat mempersiapkan SDM yang memadai.
- b. Penguatan kerja sama dengan pihak eksternal juga menjadi langkah strategi dalam mengatasi keterbatasan anggaran. Hal ini sejalan dengan sasaran strategis BAPPEDA Provinsi NTB dalam Renstra 2024-2026 dengan meningkatkan sinergitas, sinkronisasi,

27 Slamet Hariyanto dan Heru Dwi Susilo. (2021). "Evaluasi Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kantor Desa Tanggaran Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek". Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 14, Nomor 02, hlm. 308.

28 Renstra BAPPEDA Provinsi NTB 2024-2026 "Smart, integritas, Inovasi, Profesional. Mataram", 2023, hlm.49.

29 Gede Naraya, et. al. (2020). "Buunga Rampai Satu Dekade Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia". Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta Pusat. hlm. 35.

- dan integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah.³⁰ Sinegritas, sinkronisasi, dan integrasi tersebut dapat dilakukan dengan sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga donor, serta organisasi non-pemerintah yang dapat membantu dalam memperoleh dukungan tambahan, baik dalam bentuk pendanaan maupun asistensi teknis. Dengan adanya sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi, diharapkan dapat meminimalkan dampak efisiensi anggaran dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.
- c. BAPPEDA Provinsi NTB perlu menerapkan skema prioritas daerah dalam program pembangunan dengan fokus pada program-program yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan sasaran strategis BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yakni meningkatkan peran koordinatif BAPPEDA dalam pencapaian target-target program prioritas daerah.³¹ Artinya, dalam program pembangunan daerah lebih terpusat pada skala prioritas sehingga alokasi anggaran dapat terpusat pada program yang mendesak atau urgent untuk dilaksanakan yang didasarkan pada analisis berbasis data sehingga penentuan program prioritas yang ditentukan benar-benar efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, yang bukan merupakan program prioritas dapat ditunda atau digabung dengan program yang mempunyai tujuan yang serupa sehingga dampak efisiensi anggaran dapat diminimalisir dan pelayanan publik tetap terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat luas.
 - d. Penyesuaian pola kerja yang lebih fleksibel juga dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja pegawai di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pengaturan kerja fleksibel (*work flexibility*) merupakan serangkaian praktik yang memfasilitasi fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat kerja. Dengan kata lain, *work flexibility* sebagai salah satu strategi penting dan efektif yang dapat diterapkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran sehingga pencapaian target dan kinerja tetap tercapai tanpa kehadiran fisik semata pegawai.³² Adapun contoh sederhana terjadi pada masa Pandemi Covid-19 sejak Tahun 2020-2022 yang mana pada waktu itu banyak pegawai yang diharuskan *Work From Home*. Kebijakan *work from home* tersebut berdampak pada efisiensi pengeluaran anggaran seperti anggaran perjalanan dinas berupa uang harian, transportasi, penginapan, dan uang representasi³³, anggaran listrik, alat tulis kantor, rapat atau pertemuan, kendaraan operasional³⁴ dan lain sebagainya yang mana semua itu dapat menghemat anggaran belanja daerah sehingga budaya kerja lebih produktif dan inovatif walaupun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
 - e. Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program dan anggaran adalah strategi penting dalam memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak memiliki dampak negatif pada pelayanan publik. Evaluasi tersebut merupakan salah satu sasaran strategis BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yakni meningkatkan efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.³⁵ Artinya, dengan adanya evaluasi diharapkan adanya

30 Renstra BAPPEDA Provinsi NTB 2024-2026 "Smart, integritas, Inovasi, Profesional. Mataram, 2023, hlm.49.

31 Renstra BAPPEDA Provinsi NTB 2024-2026 "Smart, integritas, Inovasi, Profesional. Mataram, 2023, hlm.51.

32 Najmas Sa'adah. (2022). "Fleksibilitas Kerja: Tinjauan Literature Sistematis Dengan Bibliometric", Jurnal Fusion: Jurnal Nasional Indonesia, Volume 2, Nomor 11, hlm. 835.

33 Cantika Diva, Lili Erina, Mardianto. (2022). "Efisiensi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Masa Pandemi COVID-19 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020", PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 3(2), hlm. 15-21.

34 Efisiensi Anggaran Perusahaan di Masa Pandemi Covid-19, Apa Saja Yang Bisa Dihemat?, <https://www.assarent.co.id/berita-promo/efisiensi-anggaran-perusahaan-di-masa-pandemi-covid-19-apa-saja-yang-bisa-dihemat-1>, diakses 4 Maret 2025.

35 Renstra BAPPEDA Provinsi NTB 2024-2026 "Smart, integritas, Inovasi, Profesional. Mataram, 2023, hlm.51.

transparansi sehingga BAPPEDA Provinsi NTB dapat mengidentifikasi hambatan dan melakukan perbaikan sehingga kebijakan anggaran lebih tepat sasaran.

- f. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu strategi penting di era kebijakan efisiensi anggaran. Peningkatan koordinasi tersebut menjadi salah satu sasaran strategis BAPPEDA Provinsi NTB dan hal ini sejalan dengan pandangan Kepala BAPPEDA Provinsi NTB Bapak Dr. H. Iswandi yang menyatakan bahwa perlu adanya koordinasi bersama pemerintah pusat.³⁶ Artinya, perlu adanya koordinasi pusat dan daerah supaya dapat memberikan pelayanan publik yang optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran ini.
- g. Mendorong partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi publik/masyarakat dalam rencana pembangunan daerah merupakan strategi yang penting karena menurut Conyers sebagaimana dikutip oleh Ricky Wirawan, Mardiyono, dan Ratih Nurpratiwi bahwa masyarakat merupakan suatu alat untuk mendapatkan informasi tentang keadaan, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat; masyarakat akan lebih percaya pada program pembangunan jika dilibatkan dalam persiapan dan perencanaan karena masyarakat akan mengetahui seluk beluk program dan akan memiliki rasa terhadap program tersebut; dan mendorong partisipasi umum karena merupakan suatu hak demokrasi pada masyarakat yang dilibatkan dalam rencana pembangunan daerah.³⁷ Dengan melibatkan masyarakat diharapkan efisiensi anggaran tetap berdampak positif terhadap pelayanan publik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan beberapa strategi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik oleh BAPPEDA Provinsi NTB yakni penguatan layanan digitalisasi berupa sistem *e-planning* dan *e-budgeting*, penguatan kerjasama dengan pihak eksternal seperti sektor swasta dan akademisi, menentukan program prioritas pembangunan daerah, penyesuaian pola kerja yang fleksibel, evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program dan anggaran, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan mendorong partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah. Dari berbagai strategi tersebut diharapkan mampu meminimalisir dampak kebijakan efisiensi anggaran di BAPPEDA Provinsi NTB sehingga dapat memberikan pelayanan publik secara optimal.

KESIMPULAN

Efisiensi anggaran adalah pemangkasan anggaran pada setiap unit kerja pemerintah sehingga pemanfaatan anggaran lebih efisien dan efektif. Akan tetapi, efisiensi anggaran membawa dampak terhadap pelayanan publik berupa efisiensi anggaran operasional yang membatasi kinerja SDM, menurunnya efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan, terbatasnya program pembangunan, terhambatnya pengembangan sistem teknologi dan informasi dan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh BAPPEDA Provinsi NTB. Sedangkan strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelayanan publik oleh BAPPEDA Provinsi NTB adalah penguatan layanan digitalisasi, penguatan kerjasama

³⁶ Suara NTB. *Kebijakan Efisiensi Anggaran, Pemprov NTB Optimalkan Sumber Peningkatan PAD*, <https://suarantb.com/2025/02/08/kebijakan-efisiensi-anggaran-pemprov-ntb-optimalkan-sumber-peningkatan-pad/>, diakses 4 Maret 2025.

³⁷ Ricky Wirawan, Mardiyono, dan Ratih Nurpratiwi. (2015). "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah". JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 4, Nomor 2, hlm. 302.

dengan berbagai sektor untuk memperoleh dukungan, mengutamakan program prioritas pembangunan daerah, menerapkan pola kerja fleksibel, melakukan evaluasi efektifitas program dan anggaran secara berkala, koordinasi pusat dan daerah perlu ditingkatkan, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal walaupun dilakukan efisiensi anggaran di BAPPEDA Provinsi NTB. Adapun rekomendasi strategis yang dapat dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi NTB yakni melakukan optimalisasi anggaran berbasis kinerja seperti mengalokasikan anggaran yang menjadi prioritas; melakukan digitalisasi pelayanan perencanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan informasi teknologi untuk mempercepat pelayanan; meningkatkan kerjasama dengan pihak eksterna seperti pihak swasta, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; evaluasi dan monitoring berkelanjutan untuk mengawasi dampak kebijakan efisiensi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- ABD.Choliq, *Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/17532/Dukungan-ASN-Terhadap-Efisiensi-Anggaran-Menjadi-Kunci-Utama-Keberhasilan.html#:~:text=Tujuan%20dari%20diberlakukan%20efisiensi%20anggaran,hal%20dhal%20yang%20kurang%20bermanfaat.>, diakses 4 Maret 2025.
- Allysa Sekar Apriliani, Novi Dirgantari, Eko Hariyanto, Hardiyanto Wibowo. (2023). *“Pengaruh E-Planing E-Budgeting, dan EProcurement Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”*. Owner: Riset & Jurnal Akutansi.
- Andi Setyo Pembudi. (2023). *“Permasalahan Pelayanan Publik dan Peran Ombudsman Perwakilan Dalam Pendampingan Aparatur sipil Negara”*. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Volume 13, Nomor 2.
- BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat, *“Pengembangan e-Planing dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah”*. <https://bappeda.ntbprov.go.id/pengembangan-e-planning-dalam-sistem-informasi-pembangunan-daerah/>, diakses 4 Maret 2024.
- BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat, *“Pengembangan e-Planing dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah”*. <https://bappeda.ntbprov.go.id/pengembangan-e-planning-dalam-sistem-informasi-pembangunan-daerah/>, diakses 4 Maret 2024.
- Cantika Diva, Lili Erina, Mardianto. (2022). *“Efisiensi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Masa Pandemi COVID-19 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020”*, PESIRAH: *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3, Nomor 2.
- Dahyar Daraba, Rudi Salam, Indra Dharma Wijaya, Aris Baharuddin, Denok Sunarsi, Bustamin. (2023). *“Membangun Pelayanan Publik Yang Inofatif dan Efisien di Era Digital di Indonesia*, *Pallangga Praja*, Volume 5, Nomor 1.
- Efisiensi Anggaran Perusahaan di Masa Pandemi Covid-19, Apa Saja Yang Bisa Dihemat?*, <https://www.assarent.co.id/berita-promo/efisiensi-anggaran-perusahaan-di-masa-pandemi-covid-19-apa-saja-yang-bisa-dihemat-1>, diakses 4 Maret 2025.

- Eryana, E. (2018). “*Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa*”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Volume 7, Nomor 1.
- Frans Goo. At. al, (2019). “*Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Ciawi*”, <https://ojs.unida.ac.id>.
- Gali Artha Cendana dan Trenda Aktiva Oktariyanda. (2022). “*Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa Jmbok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang*”. Publika, Volume 10, nomor 4.
- Gede Naraya, at. al. (2020). “*buunga Rampai Satu Dekade Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*”. Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta Pusat.
- Ismmail Azwardi. (2025). “*Efisiensi Anggaran 2025 dan Ancaman terhadap Akses Keadilan bagi Masyarakat Tidak Mampu: Analisis terhadap Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015*”, <https://www.pa-sanggau.go.id>, diakses 4 Maret 2025.
- Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Prrovinsi NTB. <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses 4 Maret 2025.
- Muhammad Nasir. (2023). “*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023*”. Journal of Geopolitics and Public Policy, Volume 1, Issue 2.
- Nadia Resti Oktaviani, Vina Citra Mulyandani. (2022). “*Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan Badan Kedudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020*”. Indonesian Accounting Literacy Journal, Volume 02, Nomor 02.
- Najmas Sa’adah. (2022). “*Fleksibilitas Kerja: Tinjauan Literature Sistematis Dengan Bliibliometric*”, Jurnal Fusion: Jurnal Nasional Indonesia, Volume 2, Nomor 11.
- Nathea Citra, NTB Terima Alokasi Anggaran Rp 27,07 Triliun di 2025, Fokus pada Sektor ini, <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/bali/nusra/d-7688727/ntb-terima-alokasi-anggaran-rp-27-07-triliun-di-2025-fokus-pada-sektor-ini/amp>, diakses 4 Maret 2025.
- Novida Herlia Nita. (2023). “*Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun Anggaran 2019 Sampai Dengan 2021 di Panti Sosial Bina Wanita Melati Provinsi Kalimantan Selatan*”. Kindai, Volume 19, Nomor 3.
- Nur Cahaya, 2025, Pemprov NTB Berpotensi Efisiensi Anggaran Rp 168,17 Miliar, <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1505746504/pemprov-ntb-berpotensi-efisiensi-anggaran-rp-16817-miliar>, diakses 12 Maret 2025.
- PondRaw. “*Banggar tegaskan Pookir DPRD untuk mewujudkan NTB Gemilang*”, <https://dprd-ntbprov.go.id/banggar-tegaskan-pokir-dprd-untuk-wujudkan-ntb-gemilang/>, diakses 4 maret 2025.
- Renstra BAPPEDA Provinsi NTB 2024-2026 “*Smart, integritas, Inovasi, Profesional. Mataram*”, 2023.
- Ricky Wirawan, Mardiyono, dan Ratih Nurpratiwi. (2015). “*Partisipasi Masyarakat*

dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 4, Nomor 2.

- Siti Nur Ajizah, Endra Wijaya, dan Febri Meutia. (2021). “*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*”. *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4, No. 1.
- Slamet Hariyanto dan Heru Dwi Susilo. (2021). “*Evaluasi Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kantor Desa Tanggaran Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek*”. *Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 14, Nomor 02.
- Suara NTB. *Kebijakan Efisiensi Anggaran, Pemprov NTB Optimalkan Sumber Peningkatan PAD*, <https://suarantb.com/2025/02/08/kebijakan-efisiensi-anggaran-pemprov-ntb-optimalkan-sumber-peningkatan-pad/>, diakses 4 Maret 2025.
- Suara NTB.com, *DPRD NTB Sebut Potensi Efisiensi Anggaran di APBD 2025 Capai Rp400 Miliar*, <https://suarantb.com/2025/02/12/dprd-ntb-sebut-potensi-efisiensi-anggaran-di-apbd-2025-capai-rp400-miliar/>, diakses 4 Maret 2025.
- Sudarmono dan Ahmad Baihaki. “*Peyeragaman Standar Tarif Perjalanan Dinas Antara APBN dengan APBD*”. <https://bengkulu.bpk.go.id>, diakses 4 Maret 2025.
- TUPOKSI Bappeda, <https://bappeda.ntbprov.go.id/tupoksi-bappeda/>, diakses 3 Februari 2025.